



***RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025***



***SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Semoga dengan telah tersusunnya RENJA OPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah kegiatan pokok berupa pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kebijakan, dan kegiatan penunjang berupa kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana maupun penyediaan dukungan peralatan dan personil.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap pejabat dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya.

Nunukan, 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH, 



SERFIANUS, S.IP., M.Si

NIP. 19690112 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1	
DAFTAR ISI.....	2	
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	3	
1.2 Dasar Hukum.....	6	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8	
1.4 Sistematika Penulisan.....	9	
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	10	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	21	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	24	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29	
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	41	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43	
3.2 Program dan Kegiatan.....	45	
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		48
BAB V PENUTUP.....	59	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang di laksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga Pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

rangka menunjang visi dan misi Bupati Nunukan. Program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memperhatikan isu strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, yaitu Belum Maksimalnya penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah serta fasilitasi bantuan hukum, Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan SDA, Data administrasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis kebijakan pembangunan daerah, belum terintegrasi dan bersifat *realtime*, Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah, Rendahnya kapasitas aparatur perangkat daerah, Masih rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah, Belum maksimalnya proses pengadaan barang/jasa, Masih rendahnya kualitas pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika Penyusunan Rencana Kerja sekretariat Kabupaten Nunukan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (RENJA) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana

Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
19. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 1 tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dilaksanakan tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, sub kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program, kegiatan, sub kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja 2024 dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah
s.d. Tahun 2023 Kabupaten Nunukan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi 2023	Tingkat realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	SEKRETARIAT DAERAH									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%	100.48%	100%	100%	100.00%	100 %	%	
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					100%	107.19%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00 %	25.00 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	14 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	9 Dokumen	64.29%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	2 Dokumen	50.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	2 Dokumen	50.00%

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	2 Dokumen	50.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	2 Dokumen	50.00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100.00%	6 Laporan	12 Laporan	50.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	100%	104.13%	100%	115%	115.31%	100 %	%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/buln	100 Orang/buln	105 org/ bulan	94 org/ bulan	89.52%	105 Orang/buln	105 Orang/buln	87.50%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3775 Dokumen	826 Dokumen	750 dokumen	1173 dokumen	156.40%	750 Dokumen	2,749 Dokumen	72.82%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	70 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100.00%	14 Laporan	42 Laporan	60.00%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95%	97.92%	90%	106.25%	106.25%	95 %	%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 Org/ bulan	2 Org/ bulan	100.00%	2 orang/bulan	6 orang/bulan	300.00%

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94 Paket	22 Paket	24 paket	30 paket	125.00%	24 94 Paket	76 Paket	80.85%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100.00%	2 Orang	6 Orang	300.00%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	2 Org/ bulan	2 Org/ bulan	100.00%	2 Orang/bulan	6 Orang/bulan	300.00%
	BAGIAN UMUM						105.08%			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		100%	50%	50.00%	100 %	%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	25.00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.00%	2 Laporan	4 Laporan	50.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	-	85%	1	95.24%	87 %	%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	465 Dokumen		105 Dokumen	100 Dokumen	95.24%	100 Dokumen	200 Dokumen	43.01%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	92%	97.77%	89%	126.60%	126.60%	90 %	%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	35 Paket	7 Paket	7 Paket	5 Paket	71.43%	7 Paket	19 Paket	54.29%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40 Paket	15 Paket	20 Paket	34 Paket	170.00%	10 Paket	59 Paket	147.50%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	40 Paket	8 Paket	12 Paket	8 Paket	66.67%	8 Paket	24 Paket	60.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	180 Paket	36 Paket	36 Paket	50 Paket	138.89%	36 Paket	122 Paket	67.78%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 Paket	7 Paket	7 Paket	5 Paket	71.43%	7 Paket	19 Paket	54.29%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	290 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	153 Laporan	235.38%	58 Laporan	276 Laporan	95.17%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	##### 40.000 Dokumen	6751 Dokumen	5000 Dokumen	6619 Dokumen	132.38%	6000 Dokumen	19,370 Dokumen	48.43%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit	3 Unit	6 Unit	5 Unit	83.33%	3 Unit	Unit	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1 1 Unit	6 Unit	5 Unit	83.33%	3 Unit	9 Unit	90.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	113.63%	87%	143.44%	143.44%	90 %	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4037 Laporan	1031 Laporan	800 Laporan	1206 Laporan	150.75%	800 Laporan	3,037 Laporan	75.23%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	253 Laporan	112 Laporan	50 Laporan	62 Laporan	124.00%	50 Laporan	224 Laporan	88.54%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	225 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	70 Laporan	155.56%	45 Laporan	160 Laporan	71.11%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	100%	85%	108.33%	108.33%	90 %	%	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100.00%	12 Unit	36 Unit	300.00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84 Unit	84 Unit	84 Unit	84 Unit	100.00%	84 Unit	252 Unit	300.00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	220 Unit	220 Unit	220 Unit	220 Unit	100.00%	220 Unit	660 Unit	300.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	8 Unit	9 Unit	12 Unit	133.33%	5 Unit	25 Unit	100.00%	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95%	96.43%	92%	106.90%	106.90%	93 %	%	%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	27 Paket	135.00%	20 Paket	67 Paket	67.00%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	25 Paket	125.00%	20 Paket	65 Paket	65.00%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	140 Paket	25 Paket	28 Paket	17 Paket	60.71%	20 Paket	62 Paket	44.29%	
	BAGIAN ORGANISASI			97.22%			99.26%				
	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	100%	97.22%	100%	99.26%	99.26%	100 %	%	%	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100.00%	50 Dokumen	150 Dokumen	60.00%	

		Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	240	Laporan	44	Laporan	49	Laporan	49	Laporan	100.00%	48	Laporan	141	Laporan	58.75%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	48	Dokumen			34	Dokumen	33	Dokumen	97.06%	12	Dokumen	45	Dokumen	93.75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	145	Dokumen	29	Dokumen	30	Dokumen	30	Dokumen	100.00%	29	Dokumen	88	Dokumen	60.69%
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					101.89%					217.44%					
	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan		95%		101.89%		95%		2	217.44%		%		%	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2000	Laporan	269	Laporan	400	Laporan	616	Laporan	154.00%	300	Laporan	1,185	Laporan	59.25%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	950	Laporan	175	Laporan	170	Laporan	457	Laporan	268.82%	175	Laporan	807	Laporan	84.95%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	950	Laporan	174	Laporan	200	Laporan	459	Laporan	229.50%	175	Laporan	808	Laporan	85.05%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum		100%		100%		100%		92.87%	92.87%		100	%	%	
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN										71.43%					
	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten		Sangat Tinggi (4,21-5,00)		Tinggi (3,41-4,20)		Tinggi (3,41-4,20)		Sangat Rendah (1,6769)	92.86%		Sangat Tinggi (4,21-5,00)			
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	Dokumen	1	Dokumen	0		0				Dokumen	1	Dokumen	20.00%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	35	Dokumen	6	Dokumen	7	Dokumen	6	6 Dokumen	85.71%	7	Dokumen	19	Dokumen	54.29%

	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 4 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	12 Dokumen	60.00%
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	90%	85%	85%	50%	50.00%	90 %	%	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri	20 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	15 Dokumen	75.00%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	2 Dokumen	3 Dokumen	37.50%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	16 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	8 Dokumen	8 Dokumen	50.00%
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						106.67%			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	95%	85%	85%	1	106.67%	90 %	%	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	212 Dokumen	42 Dokumen	100 Dokumen	120 Dokumen	120.00%	42 Dokumen	204 Dokumen	96.23%
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	15 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	15 Dokumen	150.00%	3 Dokumen	26 Dokumen	173.33%

	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	2 Dokumen	5 Dokumen	50.00%
BAGIAN HUKUM							121.95%			
	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	95%	85%	85%	121.95%	121.95%	90 %	%	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2020 Dokumen	492 Dokumen	400 Dokumen	455 Dokumen	113.75%	700 Dokumen	1,647 Dokumen	81.53%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	28 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	7 Kasus	140.00%	6 Kasus	18 Kasus	64.29%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2048 2Dokumen	492 Dokumen	405 Dokumen	454 Dokumen	112.10%	706 Dokumen	1,652 Dokumen	80.66%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	86 Nilai		63 Nilai	67.90 Nilai	67.90 Nilai	73 Nilai	Nilai	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA							100.00%			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	85%	80%	80%	100%	100.00%	85.00 %	%	

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	6 Dokumen	60.00%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	3 Laporan	60.00%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14 Dokumen	32 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100.00%	34 Dokumen	120 Dokumen	857.14%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	85%	80%	80%	100%	100.00%	85 %	%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	8 Dokumen	53.33%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	10 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	7 Dokumen	70.00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat	5 Dokumen	1 1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80.00%

		dan Kawasan Permukiman, Pertanahan									
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						100.00%				
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	100%	85%	80%	100%	100.00%	90 %	%	%	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	4 Dokumen		40.00%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	4 Laporan		40.00%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	2 Laporan	4 Laporan		40.00%
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA						161.57%				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	100%	90%	80%	161.57%	161.57%	100 %	%	%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	350 Dokumen	96 Dokumen	70 Dokumen	130 Dokumen	185.71%	70 Dokumen	296 Dokumen		84.57%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	115 Dokumen	32 Dokumen	25 Dokumen	35 Dokumen	140.00%	20 Dokumen	87 Dokumen		75.65%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500 Orang	167 Orang	100 orang	159 orang	159.00%	100 Orang	426 Orang		85.20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Reformasi Birokrasi			CC	B	B	B	CC	B		B	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten			B	B	B	BB	B	B		BB	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	87	88	89	85,83	86,99		89	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)			40,00	63	73	86	40,20	67,90		86	
5	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum			100%	100%	100%	100%	103,02 %	92,87%		100%	
6	Nilai LPPD			Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah (2,55)	Sangat Rendah (1,6769)		Sangat Tinggi	

7	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas			85%	85%	90%	90%	114,83 %	121,95 %		90%	
8	Persentase kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang tepat sasaran			85%	85%	90%	90	100%	106,67 %		90	
9	Persentase realisasi program perekonomian dan SDA, administrasi pembangunan serta pengadaan barang/jasa pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	106,46 %	115,39 %		100%	
10	Persentase capaian kinerja kebijakan bidang perekonomian dan SDA			80%	80%	85%	85%	94,44%	100%		85%	
11	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan			80%	85%	90%	95%	100%	100%		95%	
12	Persentase pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai SOP			80%	90%	100%	100%	136,94 %	161,57 %		100%	

13	Persentase realisasi tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah			100%	87%	100%	100%	100,48 %	111,06 %		100%	
14	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
15	Persentase Pelayanan administrasi tata usaha pimpinan, aparatur dan sarana prasarana			87%	89%	90%	92%	101,24 %	126,60 %		92%	
16	Persentase capaian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan perangkat daerah.			100%	100%	100%	100%	102,07 %	100%		100%	
17	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan			95%	95%	95%	95%	101,89 %	145,48 %		95%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi OPD sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian yang memadai dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan baik atau buruknya kinerja OPD. Jika isu tersebut berupa kelemahan/ ancaman, harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa peluang/ kekuatan, dapat dimanfaatkan karena isu tersebut akan mengakibatkan OPD dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, telaahan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Nunukan masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Pelaksanaan Kegiatan reformasi birokrasi yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Input rencana aksi RB ke dalam sistem tidak tepat waktu Pemerintah Kabupaten Nunukan belum menyusun Peta Proses Bisnis di level Pemkab dan OPD;
- c. Kegiatan Monitoring terhadap rencana aksi tidak terlaksana dengan maksimal;
- d. Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh OPD.

2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan, diantaranya disebabkan oleh:

- a. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Target penyampaian ke Menpan yang terlambat;
- c. LKJIP OPD tidak tepat waktu dan tidak tepat sistematika penulisan;
- d. Hasil monitoring evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara efektif untuk melakukan perbaikan penerapan SAKIP, termasuk belum

menyertakan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil evaluasi tersebut, sebagai tools dalam memantau tindak lanjut rekomendasi inspektorat;

3. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalami beberapa kendala khususnya terhadap pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Tidak semua pimpinan unit pelayanan menganggap survey kepuasan masyarakat menjadi kegiatan prioritas sehingga tidak menjalankan survey dimaksud;
- b. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tidak valid;
- c. Beberapa Unit pelayanan publik tidak memiliki akses telekomunikasi yang baik, sehingga proses pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tidak optimal;
- d. Tidak berjalannya proses survey kepuasan masyarakat di beberapa unit pelayanan publik, dikarenakan adanya perubahan/mutasi petugas pelaksana/penyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat.
- e. Tidak melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.

4. Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah:

- a. Pengumuman RUP tidak tepat waktu;
- b. Proses tender pengadaan barang/jasa terlambat
- c. Keterlambatan penerbitan Berita Acara Hasil Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Operator/admin yang bertugas melaksanakan penginputan aplikasi SIRUP dan SPSE kurang memahami dan memiliki kompetensi yang baik di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi dan Kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan;
- f. Kurangnya minat dari ASN yang ada untuk menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, karena pertimbangan resiko dan insentif yang tidak sesuai dengan beban dan resiko jabatan;
- g. Masih rendahnya tingkat kematangan UKPBJ;
- h. Belum terpenuhinya standarisasi layanan pengadaan secara elektronik,

dimana dari 17 standar yang ada, baru terpenuhi 12 standar layanan pengadaan.

5. Belum optimalnya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan diantaranya adalah:
 - a. Data LPPD dari OPD belum memenuhi ketentuan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Nunukan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program, kegiatan, sub kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				57,912,678,135		URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				84,574,867,471	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	39,826,880,565		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	55,515,206,436	
	SEKRETARIAT DAERAH				13,355,374,275		SEKRETARIAT DAERAH				16,165,184,517	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	13,177,356,425	Nunukan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	15,709,957,338	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	120	13,177,356,425	Nunukan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	120	15,709,957,338	

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	178,017,850	Nunukan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	455,227,179	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	178,017,850	Nunukan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	455,227,179	
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					1,424,958,900		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				2,349,120,085	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Persen	100%	165,000,000	Nunukan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Persen	100%	232,099,585	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	25,000,000	Nunukan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	38,965,620	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	25,000,000	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	24,110,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	25,000,000	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	24,999,190	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	25,000,000	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	24,999,735	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	25,000,000	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	24,998,400	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	40,000,000	Nunukan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	94,026,340	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	584,958,900.00	Nunukan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	1,083,464,500	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	760	461,073,900.00	Nunukan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	760	935,582,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	123,885,000	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	147,882,500	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	675,000,000	Nunukan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	1,033,556,000	

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	20	175,000,000	Nunukan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	20	173,556,000	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	100,000,000	Nunukan	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	260,000,000	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	400,000,000	Nunukan	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	600,000,000	
BAGIAN UMUM				18,337,547,390		BAGIAN UMUM				25,504,410,354	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	120,000,000	Nunukan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	119,999,260	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20,000,000	Nunukan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	19,999,505	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	100,000,000	Nunukan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	99,999,755	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	90%	428,750,000	Nunukan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	90%	29,999,965	
Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket	350	198,750,000		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket	350	29,999,965	

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	120	30,000,000	Nunukan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	120	6,786,838,826	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	200,000,000	Nunukan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	86,171,400	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	92%	2,518,759,590		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	92%	4,681,440,373	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	7	82,375,500	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	7	86,171,400	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	8	297,103,900	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	8	1,231,824,080	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	8	403,848,940	Nunukan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	8	293,544,958	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	36	316,826,600	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	36	335,636,560	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7	72,217,550	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7	72,050,055	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	58	1,247,161,100	Nunukan, Jakarta, Tanjung	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	58	2,574,422,320	

						Selor & Tarakan						
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	8000	99,226,000	Nunukan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	8000	87,791,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	5	1,153,828,000	Nunukan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	5	3,404,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	1,153,828,000	Nunukan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	3,404,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	7,558,020,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	9,329,962,040	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	800	55,000,000	Nunukan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	800	51,250,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	2,275,500,000	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	2,960,454,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	45	5,227,520,000	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	45	6,318,258,040	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90%	4,407,489,800		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90%	5,330,279,266	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	442,450,000	Nunukan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	535,628,146	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	84	995,150,000	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	84	1,394,598,370	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	220	1,684,889,800	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	220	1,922,691,500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1,285,000,000	Nunukan, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Makassar, Samarinda & Tarakan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1,477,361,250	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	95%	2,150,700,000	Nunukan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	95%	2,608,729,450	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	1,150,000,000	Nunukan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	1,372,781,660	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	825,700,000	Nunukan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	998,274,990	

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Paket	20	175,000,000	Nunukan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Paket	20	237,672,800	
BAGIAN ORGANISASI				941,000,000		BAGIAN ORGANISASI				1,666,955,500	
Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	Persen	100%	941,000,000	Nunukan	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	Persen	100%	1,666,955,500	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	50	245,500,000	Nunukan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	50	616,989,250	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	48	175,500,000	Nunukan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	48	299,986,750	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	12	220,000,000	Nunukan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	12	349,988,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	29	300,000,000	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	29	399,991,500	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				5,768,000,000		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				9,829,535,980	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	95%	5,768,000,000		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	95%	9,829,535,980	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	450	3,125,750,000		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	450	6,193,888,250	

	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	210	2,250,000,000			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	210	2,885,734,230	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	210	392,250,000			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	210	749,913,500	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase Realisasi	100%	8,440,797,570			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase Realisasi	100%	16,103,733,145	
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				772,466,900			BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				1,418,608,740	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Nilai	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	672,466,900	Nunukan		Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Nilai	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	1,275,149,620	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	7	308,055,200	Nunukan		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	7	743,894,390	
	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Dokumen	4	364,411,700	Nunukan		Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Dokumen	4	531,255,230	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persen	90%	100,000,000	Nunukan		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persen	90%	143,459,120	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	4	40,000,000	Nunukan		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	4	65,180,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	20,000,000	Nunukan		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	49,536,000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	40,000,000	Nunukan		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	28,743,120	
	BAGIAN KESRA				7,038,567,870			BAGIAN KESRA				13,560,177,300	

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase	90%	7,038,567,870		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase	90%	13,560,177,300	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	43	4,766,436,612	Nunukan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	43	10,027,756,800	
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	1,020,570,450	Nunukan	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	1,125,630,500	
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Dokumen	2	1,251,560,808	Nunukan	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Dokumen	2	2,406,790,000	

BAGIAN HUKUM				629,762,800		BAGIAN HUKUM				1,124,947,105	
Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	Persen	90%	629,762,800	Nunukan	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	Persen	90%	1,124,947,105	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	405	220,725,600	Nunukan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	405	367,989,640	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	6	239,379,300	Nunukan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	6	590,005,600	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	411	169,657,900	Nunukan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	411	166,951,865	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	Indeks	86.00	9,645,000,000	Nunukan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	Indeks	86.00	12,955,927,890	
	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA serta administrasi pembangunan yang terlaksana	Persen	100%				Persentase kebijakan perekonomian dan SDA serta administrasi pembangunan yang terlaksana	Persen	100%		
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				7,824,119,500		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				11,189,842,000	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase	85%	7,599,119,500	Nunukan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase	85%	10,784,896,000	

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	156,393,200	Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	209,988,000	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	7,192,726,300	Nunukan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	10,350,918,000	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	14	50,000,000	Nunukan	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	14	223,990,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	1	100,000,000	Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	1	-	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	Dokumen	1	100,000,000	Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	Dokumen	1	-	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	Persentase	85%	225,000,000	Kab. Nunukan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	Persentase	85%	404,946,000	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	3	75,000,000	Kab. Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	3	129,992,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2	75,000,000	Kab. Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2	135,016,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	75,000,000	Kab. Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	139,938,000	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				605,000,000		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				716,746,600	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	Persen	95%	605,000,000	Nunukan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	Persen	95%	716,746,600	

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	65,000,000	Nunukan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	86,463,550	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	65,000,000	Nunukan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	79,940,000	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	475,000,000	Nunukan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	550,343,050	
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				1,215,880,500		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				1,049,339,290	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	Persen	100%	1,215,880,500	Nunukan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	Persen	100%	1,049,339,290	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	70	550,000,000	Nunukan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	70	384,358,440	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	20	500,000,000	Nunukan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	20	439,974,850	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	165,880,500	Nunukan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	225,006,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang di tujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD), dan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nunukan, tidak ada usulan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional serta program strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Tema Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, RKP 2024 tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN), ketujuh Prioritas Nasional dimaksud adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, keamanan) dan transformasi pelayanan publik,”

Lebih lanjut, RKP 2024 menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,7 persen, tingkat

kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen, nilai tukar nelayan 107-110 poin, rasio gini 0,374-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan gas emisi rumah kaca 27,27 persen, dan nilai tukar petani 105-108 poin.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Nunukan memiliki Visi: “Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan, maka ditetapkan enam misi yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram.

Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, mendukung dalam mewujudkan Misi Ke-4 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi”**.

Demi terwujudnya Visi Misi Kabupaten Nunukan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan

perencanaan pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan memiliki Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Nunukan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatkan koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	B
			Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten	BB
			Indeks kepuasan masyarakat	89
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	86
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (4,21-5,00)
			Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	95%
			Persentase kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang tepat sasaran	90%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Persentase capaian kinerja kebijakan bidang perekonomian dan SDA	85%
			Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	95%
			Persentase pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai SOP	100%
		Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dalam	Persentase perangkat daerah sesuai pedoman nomenklatur	100%
			Persentase pelayanan administrasi tata usaha pimpinan, aparatur dan sarana prasarana	92%

		memberikan pelayanan kepada pimpinan daerah dan perangkat daerah	Persentase capaian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan perangkat daerah.	100%
			Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	95%

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2025 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 19 kegiatan, dan 63 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:
 - c. Kegiatan Penataan Organisasi, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Sub Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.
 - d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
 - f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai.

- g. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan.
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- k. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- l. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan

Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

- m. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan, Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - b. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri, Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
 - c. Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 - d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan. Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Program, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari 3

- (tiga) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nunukan. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah kabupaten Nunukan;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 22 kegiatan, dan 67 sub kegiatan.

2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 84.574.867.471,- (Delapan puluh Empat milyar Lima ratus Tujuh puluh Empat juta delapan Ratus Enam Puluh Tujuh ribu Empat ratus Tujuh puluh Satu rupiah)) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nunukan. Ada pun Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/ APBN-DAK)	CATATAN PENTING
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN (rinci Desa dan Kecamatan)		
1	2	3		4	5	6	7	8
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				84,574,867,471.00		APBD KAB.	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	55,515,206,436.00		APBD KAB.	
I	SEKRETARIAT DAERAH				16,165,184,517.00			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	15,709,957,338	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	120	15,709,957,338	Nunukan	APBD KAB.	
2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	455,227,179	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	455,227,179	Nunukan	APBD KAB.	
II	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				2,349,120,085.00			

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Persen	100%	232,099,585	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	38,965,620	Nunukan	APBD KAB.	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	24,110,300	Nunukan	APBD KAB.	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	24,999,190	Nunukan	APBD KAB.	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	24,999,735	Nunukan	APBD KAB.	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	24,998,400	Nunukan	APBD KAB.	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	94,026,340	Nunukan	APBD KAB.	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	1,083,464,500.00	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	760	935,582,000	Nunukan	APBD KAB.	Honorarium Pengelola Keuangan Setda (KPA, PPK, PPK-Unit, Bendahara, Bendahara Pembantu)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	147,882,500	Nunukan	APBD KAB.	
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	1,033,556,000	Nunukan	APBD KAB.	

1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	20	173,556,000	Nunukan	APBD KAB.	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan Bupati dan Wabup
2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	260,000,000	Nunukan	APBD KAB.	Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH beserta anggota keluarga
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	600,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
III BAGIAN UMUM					25,504,410,354			
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	119,999,260	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	19,999,505	Nunukan	APBD KAB.	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	99,999,755	Nunukan	APBD KAB.	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	90%	29,999,965	Nunukan	APBD KAB.	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	120	29,999,965	Nunukan	APBD KAB.	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	92%	4,681,440,373		APBD KAB.	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	7	86,171,400	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	8	1,231,824,080	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	8	293,544,958	Nunukan	APBD KAB.	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	36	335,636,560	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	

5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7	72,050,055	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	58	2,574,422,320	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	8000	87,791,000	Nunukan	APBD KAB.	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	3,404,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	3,404,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	9,329,962,040		APBD KAB.	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	800	51,250,000	Nunukan	APBD KAB.	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	2,960,454,000	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	45	6,318,258,040	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	5,330,279,266		APBD KAB.	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	535,628,146	Nunukan	APBD KAB.	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	84	1,394,598,370	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	220	1,922,691,500	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1,477,361,250	Nunukan (Kantor Bupati), Guesthouse dan Rumjab Wakil), Jakarta, Malang, Samarinda	APBD KAB.	
7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	95%	2,608,729,450	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	1,372,781,660	Nunukan	APBD KAB.	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	998,274,990	Nunukan	APBD KAB.	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Paket	28	237,672,800	Nunukan	APBD KAB.	
IV	BAGIAN ORGANISASI				1,666,955,500			
1	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	Persen	100%	1,666,955,500	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	50	616,989,250	Nunukan	APBD KAB.	Penyederhanaan Birokrasi/kelembagaan dan Anjab OPD serta evaluasi kelembagaan
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	48	299,986,750	Nunukan	APBD KAB.	Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik, penilaian ombudsman dan PEKPPP Menpan RB
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	12	349,988,000	Nunukan	APBD KAB.	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	29	399,991,500	Nunukan	APBD KAB.	Pendampingan dan Evaluasi Implementasi SAKIP Pemda NNK
V	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				9,829,535,980			

1	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	Persen	95%	9,829,535,980		APBD KAB.	
1	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokol	Laporan	450	6,193,888,250		APBD KAB.	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	210	2,885,734,230		APBD KAB.	
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	210	749,913,500		APBD KAB.	
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase Realisasi	100%	16,103,733,145		APBD KAB.	
VI	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				1,418,608,740			
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Nilai	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	1,275,149,620	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	7	743,894,390	Nunukan	APBD KAB.	
2	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan otonomi Daerah	Dokumen	4	531,255,230	Nunukan	APBD KAB.	Evaluasi LPPD, SPM
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persen	90%	143,459,120	Nunukan	APBD KAB.	
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	4	65,180,000	Nunukan	APBD KAB.	
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	49,536,000	Nunukan	APBD KAB.	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	28,743,120	Nunukan	APBD KAB.	
VII	BAGIAN KESRA				13,560,177,300			
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase	90%	13,560,177,300		APBD KAB.	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	43	10,027,756,800	Nunukan	APBD KAB.	Anggaran Hibah/Bansos Daerah (termasuk LPTQ)

2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	1,125,630,500	Nunukan	APBD KAB.	
3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Dokumen	2	2,406,790,000	Nunukan	APBD KAB.	
VIII BAGIAN HUKUM					1,124,947,105			
1	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	Persen	90%	1,124,947,105	Nunukan	APBD KAB.	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	500	367,989,640	Nunukan	APBD KAB.	
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	6	590,005,600	Nunukan	APBD KAB.	
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	506	166,951,865	Nunukan	APBD KAB.	
III	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	Indeks	86.00	12,955,927,890	Nunukan	APBD KAB.	
IX BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA					11,189,842,000			

1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase	85%	10,784,896,000	Nunukan	APBD KAB.	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	209,988,000	Nunukan	APBD KAB.	
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	10,350,918,000	Nunukan	APBD KAB.	SOA Angkutan Udara dan TPID
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	14	223,990,000	Nunukan	APBD KAB.	tambahan kegiatan TPAKD
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	Persentase	85%	404,946,000	Kab. Nunukan	APBD KAB.	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	3	129,992,000	Kab. Nunukan	APBD KAB.	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2	135,016,000	Kab. Nunukan	APBD KAB.	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	139,938,000	Kab. Nunukan	APBD KAB.	
X	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				716,746,600			
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	Persen	95%	716,746,600	Nunukan	APBD KAB.	

1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	86,463,550	Nunukan	APBD KAB.	
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	79,940,000	Nunukan	APBD KAB.	
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	550,343,050	Nunukan	APBD KAB.	
XI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA					1,049,339,290			
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	Persen	100%	1,049,339,290	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	70	384,358,440	Nunukan	APBD KAB.	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	20	439,974,850	Nunukan	APBD KAB.	
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	225,006,000	Nunukan	APBD KAB.	Peningkatan kompetensi SDM UKPBJ, Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi SIRUP dan SPSE bagi OPD/ Penyedia

BAB V

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Kabupaten Nunukan. Rencana Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Nunukan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, juga diharapkan mampu mengimplementasikan profesionalismenya dengan berpikir rasional, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai fasilitator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator, Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu. Rencana Kerja Sekretariat Daerah akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan **political will** organisasi.

Demikian, semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.

Sekretaris Daerah Kab. Nunukan



SERFIANUS, S.I.P., M.Si
NIP.19690112 199803 1 006